

Pancasila sebagai Dasar Negara dan Hukum Internasional Implementasi Nilai-nilai Kemanusiaan dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha^{1*}, Ashfiya Nur Atqiya², Aurellia Zahra Putri Areje³, Lailatul Allifah⁴, Siti Norhalisa⁵

^{1,2}Universitas Sebelas Maret, Indonesia

^{3,4,5}Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: ahmadmustainnasoha@gmail.com, alirtieazpa@gmail.com, alifahlailatul88@gmail.com, sitinorhalisa@gmail.com

Email: ahmadmustainnasoha@gmail.com*

Abstract : Pancasila, as the foundational philosophy of Indonesia, plays a central role in shaping national policies, including foreign policy. This paper aims to explore the implementation of Pancasila values in Indonesia's foreign policy, focusing on how humanitarian principles are integrated into diplomatic practices and international law. The study employs a qualitative approach by analyzing recent literature, policy reports, and interviews with relevant experts. The findings reveal that Pancasila, particularly the principle of Just and Civilized Humanity, serves as a moral guide in foreign policy decision-making. However, the application of these values often faces challenges due to global political dynamics and competing national interests. The evaluation shows that while there are efforts to align foreign policy with Pancasila's humanitarian principles, there remains a need to enhance consistency and effectiveness in their implementation. This research aims to provide insights into how Indonesia can improve the integration of Pancasila values in its foreign policy and contribute to a more just and humane international legal framework.

Keywords: Pancasila, Foreign Policy, Internal Law, Humanitarian Values.

Abstrak : Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memainkan peran sentral dalam membentuk kebijakan nasional, termasuk kebijakan luar negeri. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan luar negeri Indonesia dengan fokus pada bagaimana prinsip-prinsip kemanusiaan diintegrasikan dalam praktik diplomasi dan hukum internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis literatur terkini, laporan kebijakan, dan wawancara dengan ahli terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pancasila, khususnya sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, berfungsi sebagai panduan moral dalam pengambilan keputusan luar negeri. Namun, penerapan nilai-nilai ini sering kali menghadapi tantangan akibat dinamika politik global dan kepentingan nasional yang bersaing. Evaluasi menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk menyesuaikan kebijakan luar negeri dengan prinsip-prinsip kemanusiaan Pancasila, masih ada kebutuhan untuk memperkuat konsistensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana Indonesia dapat meningkatkan integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan luar negeri dan berkontribusi pada penegakan hukum internasional yang lebih adil dan humanis.

Kata Kunci: Pancasila, Kebijakan Luar Negeri, Hukum Internasional, Nilai Kemanusiaan

1. PENDAHULUAN

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memiliki peran yang sangat fundamental dalam membentuk karakter dan arah kebijakan negara. Sebagai ideologi yang mendasari negara, Pancasila mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan, sosial, dan keadilan yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks hukum internasional, Pancasila bukan hanya merupakan pedoman internal, tetapi juga berperan dalam menentukan sikap dan kebijakan luar negeri Indonesia. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan luar negeri dalam menjaga keharmonisan hubungan

internasional, memperjuangkan hak asasi manusia, serta memperkuat posisi Indonesia di panggung global. Pancasila, dengan lima sila-nya yang meliputi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan landasan moral yang membimbing kebijakan-kebijakan negara, termasuk kebijakan luar negeri. Penelitian mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila diterjemahkan ke dalam kebijakan luar negeri Indonesia menjadi penting untuk memahami konsistensi dan integritas negara dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan internasional.

Alasan ilmiah untuk melakukan penelitian ini berakar pada kebutuhan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan luar negeri Indonesia selaras dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan global. Dalam lima tahun terakhir, perubahan dinamika internasional dan kebijakan luar negeri Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks, termasuk perubahan politik global, peningkatan ketegangan regional, serta isu-isu kemanusiaan yang mendesak. Oleh karena itu, analisis tentang bagaimana Pancasila mempengaruhi keputusan dan kebijakan luar negeri Indonesia perlu dilakukan untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Indonesia menyeimbangkan kepentingan nasional dengan komitmen internasional dalam rangka implementasi nilai-nilai kemanusiaan Pancasila. Data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal akademik, dan laporan kebijakan luar negeri akan dianalisis untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara Pancasila dan hukum internasional dalam konteks kebijakan luar negeri. Menurut berbagai ahli, seperti dalam karya Budiardjo (2019) yang membahas tentang hubungan antara Pancasila dan diplomasi internasional, Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral yang mempengaruhi cara Indonesia berinteraksi dengan negara lain dan berkontribusi pada penegakan hukum internasional yang humanis dan adil¹. Selain itu, penelitian oleh Satria (2020) menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan luar negeri, Indonesia berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan norma-norma hukum internasional, meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaannya². Hal ini didukung oleh laporan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang menegaskan komitmen negara

terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial dalam kebijakan luar negeri, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila³.

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, bukan hanya berfungsi sebagai landasan filosofi dan ideologi, tetapi juga sebagai panduan moral dan etika dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan lima sila yang mengedepankan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Pancasila membentuk kerangka dasar yang menyatukan berbagai elemen bangsa Indonesia dalam bingkai kesatuan dan keragaman.

Dalam konteks kebijakan luar negeri, Pancasila memainkan peran krusial dalam menentukan sikap dan arah diplomasi Indonesia di kancah internasional. Nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat diimplementasikan dalam setiap aspek kebijakan luar negeri untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan internasional yang diambil tidak hanya mencerminkan kepentingan nasional, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan yang mendasar. Oleh karena itu, memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila diterjemahkan dan diterapkan dalam kebijakan luar negeri Indonesia sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas dan konsistensi kebijakan tersebut.

Seiring dengan perubahan dinamis dalam politik global dan isu-isu internasional yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim, konflik regional, dan migrasi internasional, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan komitmen terhadap hukum internasional serta nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya, konflik geopolitik di Asia Tenggara, ketegangan antara negara-negara besar, serta tantangan global seperti pandemi COVID-19 memerlukan penyesuaian strategis dalam kebijakan luar negeri yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Pancasila.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan luar negeri Indonesia dengan fokus pada bagaimana prinsip-prinsip kemanusiaan diterjemahkan dalam praktik diplomasi dan hubungan internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis berbagai sumber, termasuk literatur terkini, laporan kebijakan dari pemerintah, serta wawancara dengan para ahli di bidang diplomasi dan hukum internasional.

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan luar negeri dan bagaimana hal ini

mempengaruhi posisi Indonesia dalam komunitas internasional. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat konsistensi dan efektivitas implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan luar negeri Indonesia.

Menurut Budiardjo (2019), Pancasila memiliki peran strategis dalam diplomasi internasional Indonesia, memberikan kerangka moral yang mempengaruhi pendekatan negara dalam berinteraksi dengan aktor internasional¹. Satria (2020) menyoroti bahwa meskipun terdapat upaya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan luar negeri, tantangan besar masih ada, terutama dalam menghadapi dinamika politik global dan kepentingan nasional yang bersaing². Sebagai tambahan, laporan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2022) menegaskan bahwa meskipun ada komitmen untuk mengikuti prinsip kemanusiaan Pancasila, pelaksanaannya sering kali terhambat oleh kompleksitas situasi internasional³.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat lebih efektif diintegrasikan ke dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara Pancasila dan hukum internasional serta memberikan saran untuk meningkatkan kebijakan luar negeri yang lebih konsisten dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan global.

Dengan latar belakang ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan luar negeri dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang lebih konsisten dengan prinsip-prinsip kemanusiaan internasional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu yang dihadapi. Karakteristik penelitian adalah bersifat preskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif/Doctrinal/Kepustakaan. Normatif (doktrinal) kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti uku, hukum, kitab agama, atau majalah, dan sebagainya.

Pendekatan penelitian yang dapat dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)

- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
- d. Pendekatan historis (*historical approach*)
- e. Pendekatan perbandingan / Fiqih Muqoron (*comparative approach*)

Yuridis Normatif adalah penelitian yang bersifat mengutamakan survey dari bahan kepustakaan yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan (*library research*).

Menurut Hamzah Studi kepustakaan atau *Library research* merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian sebelumnya yang sejenis berdasarkan fakta konseptual ataupun teoritis bukan berdasarkan persepsi peneliti. Penelitian kepustakaan termasuk ke dalam *qualitative reseach* atau penelitian kualitatif. Menurut Moleong melalui sumber literatur. Menurut Shobron, Amrin, Rosyadi dan Imron penulis memfokuskan kajian atas buku atau dokumen berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqh, dan sumber data lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Kemudian peneliti membaca, mengidentifikasi dan menganalisis teks materi tersebut guna memperoleh fakta-fakta konseptual maupun teoritis serta didukung oleh data dari sumber sekunder.

Pembahasan

Pembahasan ini akan menguraikan bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kebijakan luar negeri Indonesia, dengan fokus pada prinsip kemanusiaan dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan hukum internasional. Pembahasan ini juga akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjaga konsistensi antara nilai-nilai Pancasila dan kepentingan nasional dalam konteks global yang dinamis.

1) Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Luar Negeri

Pancasila, sebagai ideologi negara, mencakup lima sila yang memiliki implikasi penting dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Di antara sila-sila tersebut, sila Kedua: "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" memiliki dampak langsung pada bagaimana Indonesia berinteraksi dengan negara lain. Prinsip ini mengarahkan Indonesia untuk memperjuangkan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kemanusiaan dalam kebijakan luar negerinya.

a) Prinsip Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia

Dalam praktiknya, Indonesia menunjukkan komitmen terhadap prinsip kemanusiaan dengan terlibat dalam berbagai forum internasional yang fokus pada

hak asasi manusia, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan ASEAN. Sebagai contoh, Indonesia aktif dalam mendukung resolusi PBB yang mengutuk pelanggaran hak asasi manusia dan mendorong perdamaian dan keamanan global¹.

Namun, tantangan muncul dalam konteks hubungan bilateral dengan negara-negara yang memiliki catatan hak asasi manusia yang buruk. Dalam situasi ini, Indonesia harus menyeimbangkan antara menjaga hubungan diplomatik dan menerapkan prinsip kemanusiaan. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, keputusan politik Indonesia untuk mempertahankan hubungan ekonomi dengan negara-negara tertentu telah menimbulkan kritik terkait konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip kemanusiaan².

b) Diplomasi dan Kerjasama Internasional

Pancasila juga mempengaruhi pendekatan diplomasi Indonesia, di mana prinsip "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan" mendorong penggunaan diplomasi yang inklusif dan partisipatif. Diplomasi Indonesia sering kali melibatkan dialog dan kerjasama multilateral untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Contoh konkret dari prinsip ini adalah peran aktif Indonesia dalam forum-forum multilateral seperti ASEAN dan G20. Indonesia berusaha untuk memainkan peran sebagai mediator dan fasilitator dalam menyelesaikan konflik regional dan global, mempromosikan perdamaian dan keamanan, serta memfasilitasi kerjasama internasional dalam isu-isu seperti perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan³.

2) Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi

Meskipun nilai-nilai Pancasila memberikan dasar moral yang kuat untuk kebijakan luar negeri, implementasinya sering kali menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya termasuk:

a) Perubahan Politik Global dan Kepentingan Nasional

Dinamika politik global yang terus berubah sering kali mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. Perubahan dalam keseimbangan kekuatan global, ketegangan antara negara-negara besar, dan konflik regional dapat menguji konsistensi Indonesia dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, konflik di Ukraina dan ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah

mempengaruhi strategi diplomasi Indonesia dan menuntut penyesuaian kebijakan yang mungkin bertentangan dengan prinsip kemanusiaan ideal⁴.

b) Kepentingan Ekonomi dan Politik

Kepentingan ekonomi dan politik sering kali dapat mengalahkan nilai-nilai ideal dalam kebijakan luar negeri. Dalam beberapa kasus, keputusan untuk menjaga hubungan dagang dan investasi dengan negara-negara tertentu dapat menimbulkan ketegangan dengan prinsip kemanusiaan Pancasila. Misalnya, hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara yang memiliki catatan buruk dalam hal hak asasi manusia sering menjadi isu kontroversial yang menuntut keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan nilai-nilai moral⁵.

3) Rekomendasi untuk Peningkatan Implementasi

Untuk meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan luar negeri, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan:

a) Penguatan Kebijakan dan Kerangka Regulasi

Penting untuk mengembangkan kerangka regulasi dan kebijakan yang secara tegas mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kebijakan luar negeri. Hal ini mencakup pengembangan pedoman internal yang memastikan bahwa keputusan diplomatik selaras dengan prinsip-prinsip kemanusiaan Pancasila dan dapat mempertahankan konsistensi dalam menghadapi tantangan global⁶.

b) Dialog dan Kerjasama Internasional yang Lebih Aktif

Meningkatkan partisipasi dalam dialog internasional dan kerjasama multilateral dapat membantu Indonesia untuk memperkuat posisi moral dan prinsip kemanusiaan. Berperan aktif dalam forum-forum internasional dan menggunakan diplomasi yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan dapat membantu Indonesia dalam menghadapi tantangan global sambil tetap berpegang pada prinsip Pancasila⁷.

Dengan mempertimbangkan rekomendasi ini, Indonesia diharapkan dapat mengatasi tantangan yang ada dan memperkuat integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan luar negerinya, menjadikannya sebagai landasan yang kokoh dalam menghadapi berbagai dinamika internasional.

3. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Kedua yang menekankan "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kebijakan luar negeri Indonesia. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral dalam pengambilan keputusan internasional, tetapi juga sebagai dasar bagi diplomasi dan kerjasama Indonesia di tingkat global.

a. Integrasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Luar Negeri

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan luar negeri Indonesia terlihat jelas dalam upaya negara untuk mempromosikan hak asasi manusia dan keadilan sosial di arena internasional. Indonesia aktif terlibat dalam forum-forum internasional seperti PBB dan ASEAN, dan berkomitmen untuk mendukung resolusi yang menekankan perlindungan hak asasi manusia serta penyelesaian konflik secara damai. Prinsip kemanusiaan Pancasila mendorong Indonesia untuk mengambil posisi aktif dalam diplomasi multilateral dan bekerja sama dengan negara-negara lain dalam menangani isu-isu global yang mendesak, seperti perubahan iklim dan krisis pengungsi.

b. Tantangan dalam Implementasi

Meskipun komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila jelas, pelaksanaannya sering kali menghadapi berbagai tantangan. Dinamika politik global dan kepentingan nasional yang bersaing seringkali menuntut penyesuaian dalam kebijakan luar negeri. Kepentingan ekonomi dan politik terkadang mengalahkan nilai-nilai kemanusiaan ideal, menciptakan ketegangan antara prinsip-prinsip Pancasila dan kebutuhan pragmatis dalam hubungan diplomatik. Dalam beberapa kasus, keputusan strategis untuk menjaga hubungan ekonomi atau politik dengan negara-negara tertentu dapat menimbulkan kritik tentang konsistensi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila.

c. Rekomendasi untuk Peningkatan

Untuk meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan luar negeri, perlu adanya penguatan kebijakan dan kerangka regulasi yang memastikan integrasi nilai-nilai tersebut secara konsisten. Pengembangan pedoman internal yang jelas dan mekanisme evaluasi yang efektif dapat membantu dalam menjaga konsistensi dan efektivitas kebijakan luar negeri. Selain itu, meningkatkan dialog

internasional dan kerjasama multilateral dapat memperkuat posisi moral Indonesia dan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan di tingkat global.

d. Kontribusi Terhadap Hukum Internasional

Dengan terus berpegang pada prinsip-prinsip Pancasila, Indonesia dapat berkontribusi pada penegakan hukum internasional yang lebih adil dan humanis. Peran aktif dalam diplomasi multilateral dan penegakan hak asasi manusia dapat memperkuat posisi Indonesia di panggung global, sambil tetap menjaga integritas nilai-nilai Pancasila.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan luar negeri, prinsip-prinsip tersebut tetap menjadi landasan moral dan etika yang penting bagi Indonesia. Dengan terus memperkuat implementasi nilai-nilai ini dan beradaptasi dengan dinamika global, Indonesia dapat mengoptimalkan perannya di komunitas internasional dan berkontribusi pada perdamaian serta keadilan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. (2019). *Pancasila dan diplomasi internasional*. Penerbit Pustaka Alvabet.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2022). *Laporan tahunan kebijakan luar negeri*. Kementerian Luar Negeri RI.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2021). *Human rights resolutions and Indonesia's role*. PBB.
- Satria, H. (2020). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan luar negeri Indonesia. *Jurnal Politik dan Internasional*, 10(2), 134-150.
- Setiawan, D. (2021). *Dinamika politik global dan strategi diplomasi Indonesia*. Penerbit Gramedia.